



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul	: Soal tunjangan fantastis Anggota DPR, mayoritas parpol setuju dievaluasi
Tanggal	: Senin, 01 September 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

Soal Tunjangan Fantastis Anggota DPR

Mayoritas Parpol Setuju Dievaluasi

Demonstrasi diikuti kerusuhan hingga penjarahan terjadi dalam beberapa hari terakhir. Tuntutan utama aksi ini yakni kenaikan tunjangan anggota DPR. Beberapa partai pun bersikap, setuju tunjangan fantastis anggota DPR dievaluasi.

Presiden Prabowo Subianto saat konferensi pers bersama pimpinan partai politik, Minggu (31/8/2025) memastikan, pimpinan DPR telah segera akan mencabut sejumlah tunjangan anggota dewan dan memberhentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga mendorong kenaikan gaji ke luar negeri," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Nasamudin. Ada pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Lalu, Ketua Umum PKB

Muhammin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Bahill Lahadalia, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (IBAS), dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Selain itu, kata Prabowo, para pimpinan DPR dan pimpinan partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap sejumlah anggota mereka yang menyampaikan pernyataan yang membuat kegaduhan pada Pimpinan partai mencabut status keanggotaan mereka sebagai anggota DPR RI terhitung mulai 1 September 2025.

"Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut keanggotaannya," kata Prabowo.

Sejauh ini, tunjangan anggota dewan setelah demovisasi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah kota di Indonesia.

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah pimpinan DPR dan Fraksi di DPR untuk mengevaluasi tunjangan anggota

dewan. Menurut dia, ini adalah momen memperbaiki hal-hal terkait anggota DPR.

"Ini momentum baik bukan hanya soal penganggaran namun juga soal masalah kinerja. Masyarakat juga berharap DPR menghadirkan komitmen dengan kinerja yang semakin bagus," ujar Hidayat Nur Wahid kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (31/8/2025).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, pernyataan terbuka sejumlah partai politik yang setuju mengevaluasi hingga membatalkan tunjangan anggota DPR dinilai belum cukup. Menurut dia, sikap disebut masih sebatas retorika.

"Penyataan tersebut tentu saja hanya tidak hanya boretorika di media, tetapi juga mengambil langkah konkret," ujar Lucius kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (31/8/2025).

Untuk mengetahui lebih jelas pandangan dari Hidayat Nur Wahid dan Lucius Karus mengetahui sikap partai setuju tunjangan anggota DPR dievaluasi, berikut wawancaranya.

HIDAYAT NUR WAHID

Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS

Momentum Memperbaiki Penganggaran & Kinerja



“
Semua pihak bisa mengambil hikmah masing-masing. Anggota DPR bisa melaksanakan janji-janjinya dan bisa menjaga kinerjanya.

LUCIUS KARUS

Peneliti Formappi

Evaluasi Belum Cukup, Masih Sebatas Retorika



“
Komitmen yang serius untuk menolak atau mengevaluasi tunjangan harus diperlihatkan fraksi-fraksi di DPR.

Apakah PKS setuju dilakukan tindakan terhadap tunjangan anggota DPR?

Saya mengapresiasi apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, sebelumnya juga Sekretaris Jenderal DPR dan Ketua Umum Khofifah menyampaikan hal tunjangan anggota DPR. Kemungkinan akan dimotori atau kaji ulang.

Menurut Anda, keputusan ini sudah tepat?

Itu bagian dari komitmen DPR untuk memberi kepuasan bagi rakyatnya, kepuasan yang konsekuennya. Memang sebaiknya bukan hanya sesuai namun dilakukan sesuai sum-pah jabatannya.

Artinya ini akan menjadi momentum perbaikan ya?

Ya, ini momentum baik, bukan hanya soal penganggaran namun juga soal masalah kinerja.

Kenapa dengan kinerjanya?

Masyarakat juga berharap DPR menghadirkan komitmen dengan kinerja yang semakin bagus. Untuk itu, kita perlu mengevaluasi kinerjanya apa yang dilakukan sudah sesuai dengan sumpah janji dan apa yang menjadi harapan rakyat.

Menurut Formappi, langkah evaluasi tunjangan ini tidak hanya retorika semata, namun harus ditindaklanjuti oleh pimpinan DPR.

Ada tanggapan terkait ini?

Pertama, dalam momentum yang menyampaikan pimpinan DPR, Pertama Wakil Ketua DPR Pak Sofiandi Dasco Ahmad, terus Ketua DPR Ibu Puan Maharani, dilanjutkan oleh fraksi.

Jadi otomatis akan dibahas?

Ya kalau para pimpinan sudah menyampaikannya, kewajiban DPR agar BURT harus sesuai dengan arahan pimpinan DPR.

Langkah apa harapan Anda terhadap situasi saat ini?

Semua pihak bisa mengambil hikmah masing-masing. Anggota DPR bisa melaksanakan janji-janjinya dan bisa menjaga kinerjanya. ■ NNM

Ada beberapa partai yang secara terbuka menyatakan setuju untuk mengevaluasi hal-hal ini untuk mengevaluasi hal-hal ini untuk mengevaluasi tunjangan anggota DPR. Bagaimana Anda melihat sikap ini?

Kami sangat menghargai sikap partai-partai ini. Pada dasarnya, kita adalah langkah awal yang positif. Namun, sayangnya, pernyataan yang disampaikan itu masih terliah sumir atau tidak tegas.

Maksudnya bagaimana?

Terkesan hanya upaya menenangkan situasi tanpa komitmen nyata.

Terus, apa yang harusnya mereka lakukan agar terliah lebih serius?

Komitmen yang serius untuk menolak atau mengevaluasi tunjangan yang diberikan oleh DPR atau BURT, itu hanya terlihat seperti "omong-omong" saja.

Artinya dibutuhkan langkah konkret?

Ya. Fraksi-fraksi itu memiliki kekaitan yang biasa tidak untuk mendorong sebuah isu agar menjadi pemba-hasan hingga melahirkan keputusan.

Lalu, apa harapan Anda terhadap fraksi-fraksi di DPR terkait masalah ini?

Harapan kami, fraksi-fraksi harus terlihat berjuang mendekatkan pimpinan DPR agar membahas bersama respon lembaga dalam menanggapi tunjangan terhadap anggota. Mereka harus menuntaskan janji-janjinya dan upaya konkret, bukan sekadar mengajukan keputusan dari DPR atau Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Itu baru bisa disebut komitmen serius. ■ NNM